

## ABSTRACT

This study examines the association of technology acceptance variables with the behavioral intention of adopting e-government transformation from the perspective of city government employees in Indonesia and the Philippines. e-Government transformation is defined by four dimensions: using new technology systems; redesigning of governmental processes; restructuring of governmental organization; and, changing the organizational culture and behavior. Specifically, this research sought to critically analyze the extent to which performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, anxiety and attitude affect the behavioral intention, and the extent to which age and length of work experience moderate the relationships. Combined quantitative and qualitative approaches were used in the conduct of this research. Variables were operationalized into indicators, which were converted into a self-reported survey questionnaire. Survey data obtained from purposively-sampled city government employees were analyzed using structural equation modeling. Interview responses were content-analyzed to validate the quantified data. Overall, this study had a sample of 160 city government employees, coming from the department/division head level and staff level. On the whole, findings indicate that attitude is a pivotal predictor of intention to adopt e-government transformation across all four dimensions, while performance expectancy, social influence and facilitating conditions also positively influence the intention to adopt process redesign, organizational structuring, and cultural and behavioral change in the city government. Respondents' length of work experience appears as a significant moderating variable. Respondents' age does not appear to be a moderating factor. For e-government transformation to be adoptable and effectual, supporting and facilitating conditions are necessary. Structural, technical and financial support, as well as legal framework, for local e-government transformation should be in place. Activities which could promote maintaining and sustaining the positive attitude and right performance expectations towards it should be regularly carried out. Political leadership and political will must be demonstrated by significant actors and stakeholders.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menguji hubungan antara variabel penerimaan teknologi dengan niat perilaku untuk mengadopsi transformasi e-government dari perspektif pegawai pemerintah kota di Indonesia dan Filipina. Transformasi e-Government didefinisikan oleh empat dimensi: menggunakan sistem teknologi baru; mendesain ulang proses pemerintahan; restrukturisasi organisasi pemerintah; dan, mengubah budaya dan perilaku organisasi. Secara khusus, penelitian ini berusaha menganalisis secara kritis sejauh mana harapan kinerja, harapan kerja, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, kecemasan dan sikap mempengaruhi niat perilaku, dan sejauh mana usia dan lama pengalaman kerja memoderasi hubungan. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif gabungan digunakan dalam penelitian ini. Variabel dioperasionalkan menjadi indikator, yang diubah menjadi kuesioner survei yang dilaporkan sendiri. Data survei yang diperoleh dari sampel pegawai pemerintah kota secara purposive dianalisis dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural. Tanggapan wawancara adalah analisis isi untuk memvalidasi data terukur. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki sampel 160 pegawai pemerintah kota, berasal dari tingkat kepala departemen / kepala divisi dan tingkat staf. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa sikap merupakan prediktor yang sangat penting untuk mengadopsi transformasi e-government di keempat dimensi, sementara harapan kinerja, pengaruh sosial dan kondisi fasilitasi juga secara positif mempengaruhi niat untuk mengadopsi perancangan ulang proses, penataan organisasi, dan budaya dan perubahan perilaku di pemerintahan kota. Pengalaman kerja panjang responden muncul sebagai variabel moderasi yang signifikan. Usia responden tidak tampak sebagai faktor moderat. Agar transformasi e-government dapat disesuaikan dan efektif, diperlukan kondisi pendukung dan fasilitasi. Dukungan struktural, teknis dan finansial, serta kerangka hukum, untuk transformasi e-government lokal harus dilakukan. Kegiatan yang dapat mempromosikan mempertahankan dan mempertahankan sikap positif dan ekspektasi kinerja yang tepat terhadapnya harus dilakukan secara rutin. Kepemimpinan politik dan kemauan politik harus ditunjukkan oleh aktor dan pemangku kepentingan yang signifikan.